

Paradoks Feminisasi Pertanian: Waktu, Kontrol Pendapatan, dan Keadilan Nilai dalam Perspektif Intra Rumah Tangga

Wanti Fitrianti¹, Jajat Sudrajat¹, Adi Suyatno¹

¹Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura

Corresponding Author: Wanti Fitrianti, e-mail: wanti.fitrianti@faperta.untan.ac.id

Published: January , 2026

ABSTRAK

Feminisasi pertanian menandakan pergeseran struktural dalam lanskap pertanian global, ditandai dengan dinamika gender yang berubah dalam tenaga kerja pedesaan dan kesenjangan yang persisten dalam alokasi sumber daya di dalam rumah tangga. Studi ini mengkaji tiga dimensi kritis dari fenomena ini mencakup alokasi waktu, kontrol pendapatan, dan kesetaraan nilai rumah tangga petani di negara-negara berkembang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) terhadap studi yang ditinjau sejawat yang diterbitkan antara tahun 2015-2025, analisis ini mensintesis bukti terkini mengenai pola kerja berbasis gender dan hierarki pengambilan keputusan. Hasil temuan mengungkapkan bahwa alokasi waktu bukan hanya masalah logistik, tetapi cerminan dari hubungan kekuasaan berbasis gender yang mengakar. Tenaga kerja perempuan sering dianggap fleksibel dan tidak terbatas, melakukan tugas-tugas yang kurang terlihat dan kurang dihargai sehingga memperkuat ketidakberadaan struktural dan kemiskinan waktu. Meskipun keterlibatan perempuan dalam produksi, pengolahan, dan kegiatan pasar meningkat sehingga berkontribusi signifikan terhadap hasil komersial, namun manfaat ekonomi sering kali dialihkan di bawah kendali laki-laki dengan perubahan minimal dalam wewenang pengambilan keputusan. Hal ini menggarisbawahi paradoks utama feminisasi tenaga kerja tidak sama dengan feminisasi kekuasaan. Sebaliknya, komersialisasi pertanian dapat mengintensifkan eksploitasi tenaga kerja perempuan dengan mengintegrasikannya ke dalam rantai nilai tanpa imbalan yang adil. Akibatnya, perempuan menghadapi beban kerja yang meningkat tanpa peningkatan yang sepadan dalam otonomi atau kesejahteraan. Ketimpangan dalam pengakuan waktu dan keterampilan terus berlangsung dengan kontribusi perempuan jarang dikonversi menjadi hak atas pendapatan, aset, dan pengakuan publik. Dalam dinamika rumah tangga, hal ini terwujud sebagai pembagian tanggung jawab rumah tangga yang tidak merata, yang selanjutnya membatasi peluang perempuan untuk pendidikan, kesehatan, dan kemajuan ekonomi. Dengan demikian, feminisasi pertanian tanpa intervensi transformatif, berisiko memperdalam ketidaksetaraan gender daripada mendorong pemberdayaan. Pembangunan pedesaan berkelanjutan memerlukan kebijakan transformasional yang menantang penilaian asimetris terhadap tenaga kerja, mendistribusikan kembali beban kerja domestik, serta menjamin akses dan kontrol yang setara atas sumber daya produktif.

Kata kunci: alokasi waktu; feminisasi pertanian; intra rumah tangga, keadilan nilai; kontrol pendapatan

ABSTRACT

The feminization of agriculture signifies a structural shift in the global agrarian landscape, marked by changing gender dynamics in rural labor and persistent disparities in intra-household resource allocation. This study examines three critical dimensions of this phenomenon time allocation, income control, and value equity within farming households in developing countries. Utilizing a descriptive qualitative approach through a Systematic Literature Review (SLR) of peer-reviewed studies published between 2015-2025, the analysis synthesizes current evidence on gendered labor patterns and decision-making hierarchies. Findings reveal that time allocation is not merely a logistical concern but a reflection of entrenched gendered power relations. Women's labor is frequently perceived as flexible and inexhaustible, enabling its systematic deployment in low-visibility, undervalued tasks reinforcing structural invisibility and time poverty. Despite increased female engagement in production, processing, and market activities contributing significantly to commercial outputs economic benefits are often redirected under male control, with minimal shift in decision-making authority. This underscores a central paradox: the feminization of labor does not equate to the feminization of power. Instead, agricultural commercialization may intensify the exploitation of women's labor by integrating it into value chains without equitable returns. Consequently, women face escalating workloads without commensurate enhancements in autonomy or well-being. A persistent inequity in recognition persists: women's time, skills, and contributions are rarely translated into rights over income, assets, or public acknowledgment. Within household dynamics, this manifests as an unequal sharing of domestic responsibilities, further constraining women's opportunities for education, health, and economic advancement. Thus, the feminization of agriculture, absent transformative interventions, risks entrenching

gendered inequalities rather than fostering empowerment. Sustainable rural development requires policies that challenge asymmetrical labor valuation, redistribute care burdens, and ensure equitable control over resources.

Kata kunci: agricultural feminization, time allocation, income control, value equity, intra-household dynamic

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sektor pertanian global sedang mengalami transformasi struktural yang signifikan, dengan feminisasi pertanian muncul sebagai isu pembangunan utama yang memengaruhi kebijakan di seluruh dunia. Feminisasi pertanian menjadi fenomena global yang menimbulkan paradoks di mana peningkatan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pertanian (feminasi de facto) dengan kontrol yang terbatas atas aset produktif dan pengambilan keputusan (feminasi de jure). Tercatat terjadi peningkatan sebesar 47% dalam jumlah rumah tangga pertanian yang dikepalai oleh perempuan di negara-negara berkembang sejak tahun 2000. Namun, persentase perempuan yang memiliki tanah tetap tidak berubah berkisar 10-20% (Doss & Gottlieb, 2025; Kawarazuka, Doss, Farnworth, & Pyburn, 2022). Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pertanian bertepatan dengan migrasi laki-laki ke sektor non-pertanian atau wilayah perkotaan menyebabkan perempuan semakin mengambil peran sebagai pekerja, manajer, dan pengambil keputusan dalam lingkungan pertanian. Meskipun demikian, peningkatan partisipasi belum menghasilkan peningkatan yang setara dalam akses terhadap lahan, modal, teknologi, dan posisi tawar ekonomi (Asadullah & Kambhampati, 2021; Leder, 2022). Sebagian besar perempuan tetap menjadi manajer tanpa modal, yang berarti tidak memiliki akses langsung ke pinjaman formal dan sertifikat properti. Bahkan, ketika perempuan menjadi kontributor utama tenaga kerja, kewenangan untuk membuat keputusan penjualan hasil panen dan pengeluaran bernilai tinggi masih dilakukan oleh kepala rumah tangga laki-laki (Djurfeldt, Hillbom, Mulwafu, Mvula, & Djurfeldt, 2018).

Beban ganda ini membuat perempuan terjebak dalam lingkaran kemiskinan waktu, yang menyulitkan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pertumbuhan pertanian. Kemiskinan waktu perempuan menjadi elemen fundamental dalam feminisasi pertanian. Peningkatan beban kerja berdampak negatif pada waktu istirahat, keterlibatan sosial, dan kemampuan perempuan untuk mengelola kesehatan diri dan keluarga, yang berdampak merugikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Marter-Kenyon, Blakeley, Banks, Ndiaye, & Diop, 2023; Pierotti, Friedson-Ridenour, & Olayiwola, 2022). Alokasi waktu dalam rumah tangga tidak hanya mewakili masalah efisiensi, tetapi juga cerminan dan kelanjutan dari dinamika kekuasaan berbasis gender. Tenaga kerja perempuan sering kali dinilai rendah sebagai tugas alamiah atau status pembantu yang tidak dilihat sebagai pekerjaan ekonomi walaupun berperan dalam kegiatan produksi, pengolahan, dan nutrisi (Doss & Gottlieb, 2025; Haug et al., 2021). Persepsi waktu perempuan sebagai sumber daya yang tidak terbatas memungkinkan eksploitasi untuk tugas-tugas yang kurang diakui dan dihargai, sehingga memperkuat ketidaksetaraan struktural (Marter-Kenyon et al., 2023; Pierotti et al., 2022). Penilaian sosial ini mengarahkan perempuan ke segmen rantai nilai pertanian yang paling padat karya, berteknologi rendah, dan kurang dihargai, memperburuk kesenjangan produktivitas dan kesejahteraan antar gender. Sisi lainnya, fenomena ini seringkali berkorelasi dengan kemiskinan pedesaan dan guncangan struktural yang menunjukkan bahwa feminisasi lebih akurat mencerminkan penderitaan daripada jalur langsung menuju pemberdayaan perempuan (Kawarazuka et al., 2022; Pattnaik & Lahiri-Dutt, 2020).

Merujuk pada kompleksitas transformasi ini sehingga menjadi dasar untuk mengeksplorasi dinamika hubungan intra rumah tangga pertanian dan dampaknya terhadap kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dimuka, artikel ini

bertujuan menganalisis tiga dimensi sifat kompleks feminisasi pertanian yakni distribusi waktu beban kerja, kontrol ekonomi atas pendapatan pertanian, dan pengakuan nilai sosial ekonomi. Dimensi waktu mengkaji tanggung jawab ganda produktif dan reproduktif perempuan, yang mengakibatkan keterbatasan waktu dan tenaga yang menghambat kemampuan untuk memajukan usaha pertanian secara efektif (Pierotti et al., 2022). Bentuk kemiskinan ini merupakan hambatan besar bagi produktivitas pertanian perempuan dan kesejahteraan secara keseluruhan, karena membatasi peluang pengembangan keterampilan, keterlibatan pasar, dan kegiatan rekreasi yang penting untuk martabat manusia. Dimensi ekonomi menganalisis kontrol atas pendapatan pertanian dan otoritas pengambilan keputusan, menyoroti dominasi anggota rumah tangga laki-laki meskipun kontribusi tenaga kerja perempuan meningkat (Djurfeldt et al., 2018; Huyer, 2016; Valencia, Wittman, Jones, & Blesh, 2021). Dimensi keadilan nilai mengkaji kurangnya pengakuan perempuan terhadap kontribusi sosial ekonomi dalam sistem data nasional dan produktivitas pertanian. Dengan demikian memahami dinamika ini sangat penting untuk merumuskan intervensi yang efektif sehingga dapat mengubah feminisasi pertanian dari manifestasi penderitaan menjadi sarana pemberdayaan perempuan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk merangkum temuan terbaru mengenai feminisasi pertanian di negara-negara berkembang, mengikuti protokol PRISMA yang banyak digunakan dalam telaah sistematis bidang gender dan pertanian (Asare-Nuamah, Anaafo, Beuchelt, & Akurugu, 2025; Dabkien, 2025; Dev & Manalo, 2023; Haque, Kumar, & Bhullar, 2023). Pendekatan SLR memungkinkan pemetaan komprehensif atas relasi antara feminisasi pertanian. Adapun tahapan yang dilakukan, pertama melakukan pencarian secara komprehensif pada basis data internasional utama (Scopus, Web of Science, Google Scholar), kata kunci disusun dengan kombinasi operator Boolean terkait feminisasi pertanian, dinamika intra rumah tangga, beban kerja dan waktu, kontrol pendapatan, serta pengakuan nilai kerja perempuan, serupa dengan strategi pencarian bertahap pada SLR. Batas waktu 2015–2025 ditetapkan untuk menangkap pergeseran terbaru dalam literatur tentang meningkatnya peran perempuan di pertanian dan implikasinya terhadap pemberdayaan. Kedua, memilih artikel yang memenuhi menggunakan kriteria spesifik ditetapkan meliputi (a) artikel harus berfokus pada fenomena feminisasi pertanian di negara-negara berkembang; (b) artikel harus menganalisis dinamika pada tingkat unit rumah tangga; dan (c) artikel harus menyediakan data empiris yang kuat atau analisis teoretis. Ketiga, prosedur seleksi dilakukan dalam tiga tahap yang berbeda yakni (a) penyaringan awal judul dan abstrak; (b) evaluasi kelayakan teks lengkap untuk menjamin kesesuaian dengan tujuan penelitian; dan (c) ekstraksi data secara sistematis. Keempat, melakukan analisis dan sintesis basis data dengan analisis tematik, mengelompokkan literatur ke tiga kerangka utama yakni alokasi waktu, kontrol pendapatan dan keadilan nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi Waktu dan Beban Kerja Perempuan dalam Feminisasi Pertanian

Pembagian waktu berbasis gender dalam rumah tangga pertanian di negara berkembang khususnya daerah pedesaan dari Afrika sub-Sahara hingga Asia Selatan dan Tenggara ditandai dengan tanggung jawab simultan perempuan atas kerja produktif dan reproduktif sehingga menghasilkan kemiskinan waktu kronis dan membentuk dinamika feminisasi pertanian (Akram-Lodhi, 2024; Jabeen et al., 2020; Marter-Kenyon et al., 2023; Pierotti et al., 2022; N. Rao & Raju, 2020). Feminisasi tidak sekadar menunjukkan peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam tenaga kerja pertanian, melainkan mencakup pergeseran dalam siapa yang melaksanakan tugas tertentu, siapa yang mengambil keputusan terkait pengelolaan tanaman dan sumber daya, serta siapa yang mengendalikan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas pertanian.

Selaras dengan hasil penelitian kualitatif di pedesaan Senegal yang menunjukkan beban kerja individu berkorelasi dengan gender dan usia, juga dibentuk oleh komposisi rumah tangga, hierarki sosial, dan musim, dengan perempuan dan anak perempuan menanggung beban gabungan terberat atas kerja tani, pekerjaan domestik, dan perawatan, terutama selama musim hujan ketika permintaan tenaga kerja pertanian meningkat. Namun, beban waktu perempuan juga bergeser sepanjang siklus hidup ketika istri senior yang memiliki menantu perempuan memperoleh sebagian keringanan, sementara perempuan muda dan anak perempuan menyerap porsi lebih besar dari kerja domestik dan pertanian yang intensif (Marter-Kenyon et al., 2023).

Dalam rumah tangga pertanian yang mengalami feminisasi pertanian, negosiasi atas waktu dan tenaga kerja masih memprioritaskan aktivitas pertanian laki-laki, sementara lahan dan kerja non-pertanian perempuan ditempatkan pada sela-sela waktu yang tersisa. Di Nigeria barat daya, perempuan menikah “menanam sejauh yang dapat mereka kelola,” artinya produksi pertanian yang dilakukan tidak boleh mengganggu kebutuhan tenaga kerja pada lahan suami. Dampaknya, lahan milik perempuan dikerjakan lebih akhir dengan lebih sedikit tenaga kerja keluarga dan sering dikerjakan dalam kondisi kelelahan, sehingga menurunkan kuantitas sekaligus kualitas tenaga kerja yang dapat diinvestasikan (Pierotti et al., 2022). Diperkuat hasil kajian di Tanzania, perempuan bekerja rata-rata 432 menit per hari, 238 menit dihabiskan untuk kegiatan reproduksi, sedangkan pria bekerja rata-rata 408 menit per hari, dengan hanya 64 menit dihabiskan untuk tugas perawatan (Akram-Lodhi, 2024).

Pola serupa juga ditemukan di Asia Selatan, di mana perempuan secara rutin menghabiskan jauh lebih banyak jam daripada laki-laki untuk kerja domestik dan perawatan tak berbayar seperti memasak, mengambil air dan bahan bakar, membersihkan, serta pengasuhan, di samping keterlibatan dalam produksi pertanian (Islam & Sharma, 2021; Singh & Pattanaik, 2020; Tripathi, Azhar, & Zhai, 2022). Kasus dari Punjab, India, menunjukkan perempuan melakukan hingga 11 jam kerja perawatan langsung dan tidak langsung bersamaan dengan aktivitas produktif tak berbayar dan berupah rendah (S. Rao, Ramnarain, Naidu, Uppal, & Mukherjee, 2023). Partisipasi perempuan dalam kerja pertanian musiman, terutama pada periode puncak, memperberat ketegangan fisik dan membatasi waktu untuk perawatan diri serta pengasuhan anak, dengan berimplikasi bagi status gizi dan kesejahteraan keluarga (Picchioni, Zanello, Srinivasan, Wyatt, & Webb, 2020; N. Rao & Raju, 2020).

Untuk kasus di Kalimantan Barat, Indonesia, menggambarkan peningkatan adopsi komoditas komersial mengubah alokasi waktu berbasis gender dalam rumah tangga petani kecil. Partisipasi dalam skema plasma kelapa sawit meningkatkan total waktu kerja produktif bagi laki-laki dan perempuan, terutama didorong oleh kerja perkebunan di luar usaha tani sendiri. Temuan ini membuktikan komersialisasi pertanian seperti pertumbuhan proyek kelapa sawit, membuat “*perangkap waktu*” semakin ketat. Meskipun terlibat dalam pertanian komersial meningkatkan pendapatan rumah tangga, kondisi yang dihadapi memaksa perempuan untuk mengorbankan relaksasi, waktu luang, dan tidur demi memenuhi kebutuhan produktif baru, tanpa redistribusi tanggung jawab domestik yang sesuai (Rowland, Zanello, Waliyo, & Ickowitz, 2022).

Pembagian waktu dalam rumah tangga juga melampaui kerja fisik yang terlihat hingga mencakup kerja kognitif dan organisasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan secara tidak proporsional melakukan tugas mental yang terkait dengan perencanaan, koordinasi, dan pemantauan dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak, sehingga menanggung “*beban mental*” yang tidak terlihat dalam tanggung jawab sehari-hari (Krstić, Shen, Varty, Lam, & Hideg, 2025; Reich-Stiebert, Froehlich, & Voltmer, 2023). Selaras dengan temuan kajian di pedesaan Bangladesh, perempuan rata-rata mencurahkan 7,66 jam per hari untuk aktivitas rumah tangga tak berbayar sedangkan laki-laki hanya 1,06 jam (Islam & Sharma, 2021). Kondisi demikian mengindikasikan elastisitas waktu perempuan adalah ekspektasi normatif yang berakar pada struktur patriarki yang menempatkan pria sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengasuh yang waktunya selalu tersedia untuk pemeliharaan rumah tangga. Kondisi ini memunculkan

kontradiksi struktural bahwa waktu laki-laki dianggap terbatas dan bernilai ekonomi, sedangkan waktu perempuan diasumsikan sangat fleksibel, mudah diakses untuk pengasuhan tanpa imbalan atau pengakuan. Pola ini juga menegaskan bahwa feminisasi pertanian tanpa mengubah hubungan gender hanya memperkuat beban dan tugas perempuan yang ada, sehingga menghasilkan bentuk eksploitasi baru namun menampilkan kesan ada peningkatan keterlibatan dalam produksi pertanian.

Secara keseluruhan, studi-studi empiris sudah memperlihatkan bagaimana feminisasi tenaga kerja pertanian ditunjukkan dengan melalui alokasi waktu perempuan yang padat dan sering tumpang tindih di ranah pertanian, rumah tangga, dan komunitas (Marter-Kenyon et al., 2023; Picchioni et al., 2020; Pierotti et al., 2022; N. Rao & Raju, 2020; S. Rao et al., 2023; Rowland et al., 2022). Beban ganda yang ditanggung perempuan hanya menghasilkan fenomena yang disebut *penindasan temporal*, di mana kemiskinan waktu perempuan berfungsi sebagai hambatan struktural bagi pemberdayaan ekonomi dan kemajuan pertanian. Klaim prioritas atas tenaga kerja dan durasinya mengungkap ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan. Pada akhirnya, kelangkaan waktu membatasi partisipasi perempuan dalam pelatihan, adopsi teknologi penghemat tenaga kerja, akses ke pekerjaan di luar pertanian bernilai lebih tinggi, dan peningkatan skala operasi pertanian hanya mengurangi produktivitas individu dan rumah tangga (Johnston, Stevano, Malapit, Hull, & Kadiyala, 2018; Marter-Kenyon et al., 2023; Pierotti et al., 2022). Dengan demikian, alokasi waktu dalam perspektif gender ini bukan semata-mata hasil pertimbangan efisiensi, melainkan berakar pada norma patriarkal yang memosisikan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengasuh utama serta pengelola rumah tangga, sehingga kerja tak berbayar perempuan menjadi perlu secara struktural namun terdevaluasi secara sosial dan ekonomi (Islam & Sharma, 2021; Singh & Pattanaik, 2020; Tripathi et al., 2022). Akibatnya, waktu tidak hanya muncul sebagai batasan logistik, tetapi juga sebagai poros fundamental kekuasaan dan penyingkiran berbasis gender dalam sistem pertanian menjadikan perempuan penting sekaligus tidak terlihat.

Determinan Kontrol Pendapatan Dalam Rumah Tangga Pertanian

Determinan faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol pendapatan dalam rumah tangga petani mencerminkan kombinasi sumber daya material, norma sosial, struktur rumah tangga, dan proses komersialisasi pertanian. Bukti dari kasus petani sayuran di Kenya Afrika menunjukkan kepemilikan lahan dan tingkat pendidikan perempuan signifikan meningkatkan pemberdayaan intra-rumah tangga dan peluang mempertahankan kontrol atas pendapatan pertanian, sementara pekerjaan off-farm justru berkorelasi negatif dengan pemberdayaan karena mengalihkan waktu dan perhatian dari aktivitas pertanian yang menjadi basis posisi tawar perempuan. Bahkan, ketika perempuan secara formal memiliki lahan, hak atas tanah yang bias gender dan praktik adat dapat membatasi kontrol efektif atas penggunaan lahan dan pendapatan yang dihasilkannya, sehingga melemahkan potensi aset sebagai “*modal tawar-menawar*” dalam negosiasi rumah tangga (DeiJler, Krause, & Grote, 2025).

Dinamika komersialisasi pertanian menjadi determinan penting lain dari kontrol pendapatan. Kajian di Uganda menemukan bahwa program komersialisasi padi secara signifikan menurunkan pemberdayaan perempuan dalam produksi dan kontrol atas pendapatan, pada sisi lainnya meningkatkan pemberdayaan laki-laki (Ntakyio & Van Den Berg, 2022). Analisis inovasi pertanian di Uganda juga menunjukkan pola serupa semakin besar kontribusi suatu komoditas terhadap pendapatan rumah tangga, semakin kuat otoritas pengambilan keputusan laki-laki atas manajemen dan penggunaan hasil, mengindikasikan adanya “*male capture*” atas keuntungan bahkan dari tanaman yang sebelumnya dikategorikan sebagai tanaman perempuan (Shibata, Cardey, & Dorward, 2020). Penelitian tentang komersialisasi di Malawi juga menunjukkan temuan yang sama bahwa dalam rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki, ditandai dengan laki-laki mendominasi keputusan tentang plot yang dikomersialkan, penjualan hasil, dan alokasi pendapatan, sedangkan

keterlibatan perempuan di pasar dibatasi oleh minimnya akses terhadap sarana produksi (Mgalamadzi, Matita, & Chimombo, 2024).

Struktur rumah tangga dan status perkawinan juga membentuk kemampuan perempuan mengontrol pendapatan. Di Ethiopia, perempuan yang tidak menikah lebih mungkin memiliki lahan sendiri dan mengendalikan keputusan produksi dan pengeluaran daripada perempuan menikah (Badstue, Petesch, Farnworth, Roeven, & Hailemariam, 2020). Di banyak kasus Asia Selatan dan Asia Tengah, sistem patriarkal membatasi mobilitas, partisipasi pasar, dan peran formal perempuan dalam keputusan ekonomi, sehingga memperkecil peluang untuk mengklaim dan mempertahankan kontrol pendapatan meskipun kontribusi kerja besar secara substansial (Jabeen et al., 2020).

Akses terhadap organisasi dan lembaga kolektif juga merupakan faktor kelembagaan yang menjadi kunci yang dapat mengubah pola kontrol pendapatan. Kasus peternak sapi perah kecil di Kenya menunjukkan bahwa keanggotaan dalam organisasi produsen meningkatkan kontrol perempuan atas keputusan produksi, transaksi lahan dan ternak, penggunaan kredit, dan penerimaan pendapatan susu; efeknya lebih kuat bila perempuan sendiri yang terdaftar sebagai anggota (Mwambi, Bijman, & Galizi, 2021). Kasus di Kenya, keanggotaan koperasi dan peningkatan akses informasi pasar melalui teknologi digital diidentifikasi sebagai saluran potensial untuk memperkuat bargaining power perempuan, selama hambatan normatif terhadap akses perempuan ke pasar dan layanan keuangan juga diatasi (Adegbite & Machethe, 2020; Deifler et al., 2025).

Beberapa hasil studi empiris membuktikan bahwa peningkatan kontrol perempuan terhadap pendapatan rumah tangga menghasilkan alokasi sumber daya yang meningkatkan kesejahteraan anak dan mendorong pengembangan modal manusia jangka panjang. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki kekuasaan pengambilan keputusan terkait pendapatan, terjadi peningkatan yang signifikan pada indikator kesejahteraan rumah tangga, seperti kualitas makanan, pendidikan anak, dan pengeluaran kesehatan, terlepas dari proporsi pendapatan kecil yang mungkin mereka kendalikan (Mohammed, Khonje, & Qaim, 2025; A Quisumbing et al., 2023; Agnes Quisumbing et al., 2021). Pola ini menunjukkan konsistensi di berbagai hasil penelitian dari Ethiopia, Gambia, dan berbagai lokasi di Afrika Sub-Sahara menunjukkan hubungan antara pemberdayaan ekonomi perempuan dan otoritas pengambilan keputusan, yang mengarah pada peningkatan keragaman pola makan dan penurunan indikator gizi buruk anak, termasuk stunting dan anemia (Christian et al., 2023; Melesse, 2021; Sey-Sawo, Sarr, Bah, & Senghore, 2023). Tren ini menunjukkan di mana kekuatan ekonomi perempuan merupakan faktor kunci dalam mengurangi gizi buruk pada anak-anak, terutama anemia dan stunting untuk mencapai pembangunan pedesaan jangka panjang dan kesejahteraan anak. Perempuan berperan sebagai katalis utama untuk menurunkan siklus kemiskinan antar generasi. Namun demikian, kemungkinan terdapat potensi trade-off dalam situasi tertentu, peningkatan kontrol perempuan atas pendapatan tanpa peningkatan daya tawar yang setara, dapat menyebabkan peningkatan beban kerja atau membuat perempuan rentan terhadap reaksi negatif sehingga mengurangi manfaat kesejahteraan.

Keadilan Nilai dan Pengakuan Kontribusi Perempuan

Feminisasi pertanian menunjukkan partisipasi perempuan dalam sektor ini meningkat bahkan ketika partisipasi angkatan kerja perempuan secara keseluruhan stagnan atau menurun, menandakan bahwa pertanian tetap menjadi pemberi kerja dan basis penghidupan penting bagi perempuan (Asadullah & Kambhampati, 2021; Doss & Gottlieb, 2025). Namun, pada saat yang sama, peran pertanian perempuan dibentuk oleh norma gender yang mendefinisikan laki-laki sebagai “petani” dan perempuan sebagai “pembantu,” sehingga mereproduksi ketimpangan pengakuan dan akses terhadap sumber daya produktif (Carnegie, Cornish, Htwe, & Htwe, 2020; Haug et al., 2021). Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan di India menunjukkan sejumlah besar perempuan terlibat dalam lebih dari setengah tenaga kerja pertanian tetapi sering diabaikan dalam

statistik resmi, karena sertifikat tanah dan sebutan "petani" biasanya terdaftar atas nama laki-laki (Dharamshi, Moskovitz, & Munshi, 2023; Jy, Lahoti, & Swaminathan, 2025).

Selanjutnya, keadilan pengakuan dan ketidaksetaraan gender dalam pertanian bukan hanya sebagai masalah distribusi sumber daya tetapi sebagai masalah penilaian sosial. Tiga bentuk ketidakadilan nilai yang meminggirkan perempuan selama transisi pertanian antara lain:

1. Ketidakberdayaan ekonomi terus berlanjut karena perempuan masih diklasifikasikan sebagai "pekerja keluarga tidak dibayar" atau "istri petani" daripada sebagai produsen otonom. Penunjukan ini mendiskreditkan pekerjaan, mencegah menerima perlindungan sosial, kredit, dan layanan penyuluhan formal (Alary, Romagny, Najjar, Aderghal, & Moisseron, 2025; Asadullah & Kambhampati, 2021; Pattnaik & Lahiri-Dutt, 2021).
2. Delegitimasi epistemik terjadi ketika pengetahuan lokal tetap menjadi hambatan yang signifikan. Pengetahuan perempuan tentang konservasi benih, pengelolaan tanah, dan adaptasi iklim sering ditolak karena dianggap sebagai "intuitif" atau "tradisional" daripada ilmiah (Begho, Dendup, Tshering, Nepal, & Joshi, 2025; Van Zonneveld, Turmel, & Hellin, 2020). Model pertanian modern dan proses mekanisasi sering kali mencerminkan "bias yang berpusat pada laki-laki," menekankan teknologi yang dibangun untuk fisiologi dan pengalaman laki-laki, meningkatkan ketergantungan perempuan pada inovasi eksternal yang tidak mereka kontribusikan (Afridi, Bishnu, & Mahajan, 2022). Persepsi ini menyebabkan pengucilan perempuan dalam agenda penelitian, layanan penyuluhan, dan desain inovasi.
3. Perempuan menghadapi marginalisasi politik yang terjadi dalam pengambilan keputusan ketika dikeluarkan dari forum yang membahas pemilihan tanaman, investasi, dan kebijakan iklim, meskipun melakukan sebagian besar pekerjaan harian (Anik & Rahman, 2020; Mgalamadzi et al., 2024). Pengecualian ini diperparah oleh bias survei "kepala rumah tangga", yang secara efektif membungkam suara perempuan di seluruh pengumpulan data nasional (Doss & Gottlieb, 2025; Jy et al., 2025).

Keadilan nilai dalam pertanian dan rumah tangga berkaitan dengan sejauh mana kontribusi perempuan terhadap produksi, reproduksi sosial, dan nilai ekonomi maupun sosial diakui, dihargai, dan dibalas secara setara. Dalam pertanian keluarga, pembagian kerja "*tradisional*" menciptakan pemisahan tugas laki-laki dan perempuan, di mana perempuan sering menjadi tenaga kerja tidak dibayar dan tidak terlihat, meskipun kerja mereka esensial bagi keberlangsungan usaha tani dan rumah tangga (Contzen & Forney, 2017). Perempuan di negara berkembang menyumbang porsi besar tenaga kerja pertanian dan berperan sentral dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran pangan, namun kerja mereka kerap tidak terlihat atau diremehkan dalam kebijakan dan statistik (Doss & Gottlieb, 2025; Haug et al., 2021). Di banyak konteks negara berpendapatan rendah dan menengah, perempuan terlibat dalam pertanian subsisten maupun komersial, pemeliharaan ternak, pengelolaan benih, serta penanganan pascapanen, sering kali sebagai pekerja keluarga tidak dibayar atau buruh informal (Doss & Gottlieb, 2025; Haug et al., 2021; Pierotti et al., 2022).

Di sepanjang rantai nilai pangan, keadilan nilai juga menyentuh siapa yang memperoleh bagian nilai tambah dan bagaimana kontribusi pada tiap simpul diakui. Kajian tentang rantai nilai sayuran tradisional di Tanzania menunjukkan bahwa petani melakukan pembagian kerja yang relatif seimbang antara suami istri, tetapi perempuan menerima bagian pendapatan dan kendali pengeluaran yang jauh lebih kecil, mengindikasikan pemisahan tajam antara kontribusi kerja dan pembagian manfaat (Fischer, Patt, Ochieng, & Mvungi, 2020). Perspektif feminis dalam analisis rantai nilai menyoroti bahwa perempuan sering terkonsentrasi pada mata rantai bernilai rendah dan berupah rendah, sementara kerja mereka dalam pemrosesan, penjualan kecil, dan pekerjaan rumah yang menopang produksi tetap tersembunyi dari perhitungan nilai formal (Brückner & Sardadvar, 2023). Keadilan nilai menuntut tidak hanya distribusi pendapatan yang lebih adil, tetapi juga pengakuan simbolik dan institusional atas kerja perempuan sebagai pencipta nilai, bukan sekadar kepanjangan dari peran domestik.

Konsep keadilan nilai semakin dalam berdasarkan kajian pendekatan keadilan kontribusif dan keadilan pengakuan. Pendekatan ini menegaskan bahwa yang penting bukan hanya berapa

banyak kerja yang dicurahkan, tetapi bagaimana tugas bermakna dan tugas berat didistribusikan dan dinilai secara adil di antara anggota rumah tangga dan pelaku rantai nilai (Boillat, Bottazzi, & Sabaly, 2023; Timmermann & Frlax, 2015). Dalam konteks rumah tangga, keadilan nilai juga terkait dengan rasa keadilan subjektif dan kepuasan keluarga. Pada pertanian keluarga, konfigurasi yang secara objektif tidak setara dapat tetap dipersepsi sebagai “*adil*” ketika ada pengakuan timbal balik dan penghargaan simbolik terhadap kontribusi masing masing anggota, termasuk perempuan (Contzen & Forney, 2017). Namun, penelitian feminis agraria mengingatkan bahwa persepsi keadilan yang dibentuk oleh norma patriarkal sering menormalisasi “*housewifization global*”, di mana kerja reproduktif dan subsistensi perempuan di pedesaan menopang kapitalisme agraria tanpa kompensasi dan pengakuan yang setara (Akram-Lodhi, Yadav, Mezzadri, & Taylor, 2025). Oleh karena itu, kerangka keadilan nilai dalam rumah tangga pertanian menempatkan perhatian bukan hanya pada distribusi materi, tetapi juga pada pengakuan epistemik, simbolik, dan institusional terhadap kontribusi perempuan sebagai fondasi reformasi yang berkeadilan gender.

Akhirnya, menegakkan keadilan nilai bagi perempuan membutuhkan lebih dari sekadar redistribusi sumber daya sehingga memerlukan konfigurasi ulang pengakuan yang mendalam. Hal ini memerlukan pembingkai ulang istilah “*petani*” untuk mencakup semua jenis tenaga kerja pertanian, mengukur kontribusi keluarga yang tidak terlihat, dan mengakui pengetahuan adat perempuan sebagai sumber fundamental inovasi agraria. Kebijakan keadilan nilai harus mengintegrasikan akses pasar dengan perlindungan kelembagaan, termasuk kontrak yang responsif gender, skema harga minimum yang melindungi petani kecil, dan mekanisme tata kelola yang menegaskan hak perempuan sebagai pemohon daripada pekerja sementara (Graddy-Lovelace et al., 2023; Karatepe & Scherrer, 2024; Thorpe, 2018).

SIMPULAN

Feminisasi pertanian menunjukkan hubungan yang kompleks dan saling memperkuat antara alokasi waktu, kontrol ekonomi, dan pengakuan keadilan nilai. Kondisi saat ini mengindikasikan pertanian menjadi lebih feminin karena terdapat kesenjangan yang lebih besar antara peran penting yang dimainkan perempuan dalam produksi dan status sosial ekonomi yang tidak stabil. Meskipun perempuan telah menggantikan laki-laki dalam ekonomi pertanian karena migrasi ke perkotaan, tetap menjadi “*aktor bayangan*” karena menghadapi hambatan kelembagaan terhadap kepemilikan tanah, kredit, dan pengakuan formal sebagai petani sejati. Beban ganda perempuan dalam pekerjaan reproduktif (aktivitas pertanian) dan domestik (pekerjaan rumah tangga) menciptakan kemiskinan waktu kronis, membatasi kemampuan untuk meningkatkan usaha pertanian, mengakses pasar yang jauh, atau berpartisipasi dalam lembaga ekonomi. Ketika norma-norma patriarki menguntungkan lahan yang dikelola laki-laki, perempuan terpaksa “*menelola hanya apa yang mampu mereka tangani*” setelah menyelesaikan tanggung jawab rumah tangga, yang secara sistematis mengurangi produktivitas dan volume hasil pertanian yang dihasilkan. Pada saat yang sama, ketika pendapatan pertanian meningkat melalui komersialisasi atau integrasi ke rantai nilai bernilai tinggi, kontrol atas pendapatan kerap beralih ke laki-laki, meskipun perempuan menanggung bagian besar kerja produksi dan pengolahan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang signifikan dalam pengakuan nilai, tenaga kerja fisik perempuan dan pengetahuan masyarakat adat tidak cukup dikonversi menjadi aset formal, hak pendapatan, atau pengakuan sosial sebagai pelaku ekonomi utama. Integrasi ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa pengurangan beban kerja tanpa penguatan hak ekonomi, atau peningkatan pendapatan tanpa redistribusi waktu dan kuasa, tidak cukup memadai untuk mencapai keadilan nilai bagi perempuan dalam sistem agraria yang terfeminisasi. Mengubah feminisasi menjadi pemberdayaan memerlukan kebijakan yang mengakui dan mengkompensasi waktu perempuan, meningkatkan kendali atas sumber daya ekonomi, dan menghilangkan hambatan kelembagaan yang membatasi pada posisi paling rentan dalam rantai nilai pertanian. Tanpa mengakui perempuan sebagai subjek produksi yang independen, feminisasi dalam pertanian akan terus menjadi proses eksploitasi yang semakin intensif daripada jalan menuju pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegbite, O., & Machethe, C. (2020). Bridging the financial inclusion gender gap in smallholder agriculture in Nigeria: An untapped potential for sustainable development. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104755>
- Afridi, F., Bishnu, M., & Mahajan, K. (2022). Gender and mechanization: Evidence from Indian agriculture. *American Journal of Agricultural Economics*. <https://doi.org/10.1111/ajae.12315>
- Akram-Lodhi, A., Yadav, S., Mezzadri, A., & Taylor, M. (2025). What Is the Value of Value for Agrarian Studies? *Journal of Agrarian Change*. <https://doi.org/10.1111/joac.70020>
- Akram-Lodhi, A. (2024). 'Women stay behind and grow the food': Agricultural productivity and the interstices of petty commodity production and reproductive labour in Tanzania. *Journal of Agrarian Change*. <https://doi.org/10.1111/joac.12588>
- Alary, V., Romagny, B., Najjar, D., Aderghal, M., & Moissoner, J.-Y. (2025). The Capacity of a Household Farming System with Women's Decision and Action-Making Power: Rural Marginal Areas in Morocco. *Agriculture*. <https://doi.org/10.3390/agriculture15030319>
- Anik, A., & Rahman, S. (2020). Women's Empowerment in Agriculture: Level, Inequality, Progress, and Impact on Productivity and Efficiency. *The Journal of Development Studies*, 57, 930–948. <https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1817393>
- Asadullah, M., & Kambhampati, U. (2021). Feminization of farming, food security and female empowerment. *Global Food Security*. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100532>
- Asare-Nuamah, P., Anafo, D., Beuchelt, T., & Akurugu, C. (2025). A systematic review of gender in participatory and social learning research in agriculture and land management in Africa. *Frontiers in Sustainable Food Systems*. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1628825>
- Badstue, L., Petesch, P., Farnworth, C., Roeven, L., & Hailemariam, M. (2020). Women Farmers and Agricultural Innovation: Marital Status and Normative Expectations in Rural Ethiopia. *Sustainability*, 12, 9847. <https://doi.org/10.3390/su12239847>
- Begho, T., Dendup, S., Tshering, D., Nepal, B., & Joshi, R. (2025). Agricultural resource access, decision-making and women's empowerment in climate-vulnerable smallholder agriculture: evidence from Nepal and Bhutan. *Frontiers in Sustainable Food Systems*. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1654941>
- Boillat, S., Bottazzi, P., & Sabaly, I. K. (2023). The division of work in Senegalese conventional and alternative food networks: a contributive justice perspective 7. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1127593>
- Brückner, M., & Sardadvar, K. (2023). The hidden end of the value chain: potentials of integrating gender, households, and consumption into agrifood chain analysis. *Frontiers in Sustainable Food Systems*. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1114568>
- Carnegie, M., Cornish, P., Htwe, K., & Htwe, N. (2020). Gender, decision-making and farm practice change: An action learning intervention in Myanmar. *Journal of Rural Studies*, 78, 503–515. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.01.002>
- Christian, A., Atiglo, D., Okyere, M., Obeng-Dwamena, A., Marquis, G., & Jones, A. (2023). Women's empowerment, children's nutritional status, and the mediating role of household headship structure: Evidence from sub-Saharan Africa. *Maternal & Child Nutrition*, 19. <https://doi.org/10.1111/mcn.13520>
- Contzen, S., & Forney, J. (2017). Family farming and gendered division of labour on the move: a typology of farming-family configurations. *Agriculture and Human Values*, 34, 27–40. <https://doi.org/10.1007/s10460-016-9687-2>
- Dabkien, V. (2025). Gender, Women's Barriers and Innovation in Agriculture: A Systemic

- Literature Review. *European Countryside*, 17, 1–26. <https://doi.org/10.2478/euco-2025-0001>
- Deijl, L., Krause, H., & Grote, U. (2025). Women's empowerment and household welfare in the Kenyan African Indigenous Vegetable supply chain. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04832-w>
- Dev, D. S., & Manalo, J. A. (2023). Gender and adaptive capacity in climate change scholarship of developing countries: a systematic review of literature. *Climate and Development*, Vol. 15, pp. 829–840. Informa UK Limited. <https://doi.org/10.1080/17565529.2023.2166781>
- Dharamshi, K., Moskovitz, L., & Munshi, S. (2023). Securing a Sustainable Future: A Path towards Gender Equality in the Indian Agricultural Sector. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su151612447>
- Djurfeldt, A. A., Hillbom, E., Mulwafu, W., Mvula, P., & Djurfeldt, G. (2018). “The family farms together, the decisions, however are made by the man” -Matrilineal land tenure systems, welfare and decision making in rural Malawi. *Land Use Policy*, 70, 601–610. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.10.048>
- Doss, C., & Gottlieb, C. (2025). Gendered Patterns of Labor in Agriculture. *Agricultural Economics*. <https://doi.org/10.1111/agec.70012>
- Fischer, G., Patt, N., Ochieng, J., & Mvungi, H. (2020). Participation in and Gains from Traditional Vegetable Value Chains: a Gendered Analysis of Perceptions of Labour, Income and Expenditure in Producers' and Traders' Households. *The European Journal of Development Research*, 32, 1080–1104. <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00257-0>
- Graddy-Lovelace, G., Krikorian, J., Jewett, A., Vivekanandan, A., Stahl, K., Singh, I. S., ... Pennick, E. (2023). Parity as radical pragmatism: Centering farm justice and agrarian expertise in agricultural policy. 7. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1066465>
- Gupta, P. (2025). A Systematic Review on Women's Participation in Agricultural Work and Nutritional Outcomes. Retrieved from <https://consensus.app/papers/a-systematic-review-on-womens-participation-in-gupta/f21597d8ce285946b5bcd1425a5c7337/>
- Haque, A. S., Kumar, L., & Bhullar, N. (2023). Gendered perceptions of climate change and agricultural adaptation practices: a systematic review. *Climate and Development*, 15, 885–902. <https://doi.org/10.1080/17565529.2023.2176185>
- Haug, R., Mwaseba, D., Njarui, D., Moeletsi, M., Magalasi, M., Mutimura, M., ... Aamodt, J. (2021). Feminization of African Agriculture and the Meaning of Decision-Making for Empowerment and Sustainability. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su13168993>
- Huyer, S. (2016). Closing the Gender Gap in Agriculture. *Gender, Technology and Development*, 20, 105–116. <https://doi.org/10.1177/0971852416643872>
- Islam, F., & Sharma, M. (2021). Gendered Dimensions of Unpaid Activities: An Empirical Insight into Rural Bangladesh Households. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su13126670>
- Jabeen, S., Haq, S., Jameel, A., Hussain, A., Asif, M., Hwang, J., & Jabeen, A. (2020). Impacts of Rural Women's Traditional Economic Activities on Household Economy: Changing Economic Contributions through Empowered Women in Rural Pakistan. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12072731>
- Johnston, D., Stevano, S., Malapit, H., Hull, E., & Kadiyala, S. (2018). Review: Time Use as an Explanation for the Agri-Nutrition Disconnect: Evidence from Rural Areas in Low and Middle-Income Countries. *Food Policy*, 76, 8–18. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.12.011>
- Jy, S., Lahoti, R., & Swaminathan, H. (2025). Who Is Responding? Spousal Perspectives on Agricultural Decision-Making in India. *Journal of Agrarian Change*. <https://doi.org/10.1111/joac.70012>

- Karatepe, I., & Scherrer, C. (2024). Smallholder Challenges of Social and Economic Upgrading in Agricultural Value Chains: A Cross-country, Cross-crop Comparison. *Agarian South Journal of Political Economy*, 13, 317–340. <https://doi.org/10.1177/22779760241261445>
- Kawarazuka, N., Doss, C., Farnworth, C., & Pyburn, R. (2022). Myths about the feminization of agriculture: Implications for global food security. *Global Food Security*. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100611>
- Krstić, A., Shen, W., Varty, C., Lam, J., & Hideg, I. (2025). Taking on the Invisible Third Shift: The Unequal Division of Cognitive Labor and Women's Work Outcomes. *Psychology of Women Quarterly*, 49, 205–219. <https://doi.org/10.1177/03616843251330284>
- Leder, S. (2022). Beyond the 'Feminization of Agriculture': Rural out-migration, shifting gender relations and emerging spaces in natural resource management. *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.02.009>
- Marter-Kenyon, J., Blakeley, S., Banks, J., Ndiaye, C., & Diop, M. (2023). Who has the time? A qualitative assessment of gendered intrahousehold labor allocation, time use and time poverty in rural Senegal. *Frontiers in Sustainable Food Systems*. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1198290>
- Melesse, M. (2021). The effect of women's nutrition knowledge and empowerment on child nutrition outcomes in rural Ethiopia. *Agricultural Economics*. <https://doi.org/10.1111/agec.12668>
- Mgalamadzi, L. M., Matita, M., & Chimombo, M. (2024). The gendered nature of household decision making and expenditure choices in the context of smallholder agricultural commercialization in Malawi. *CABI Agriculture and Bioscience*, 5. <https://doi.org/10.1186/s43170-024-00270-x>
- Mohammed, F. Y., Khonje, M., & Qaim, M. (2025). Women's roles in decision-making and nutrition-sensitive agriculture. *Food Security*, 17, 1301–1315. <https://doi.org/10.1007/s12571-025-01553-5>
- Mwambi, M., Bijman, J., & Galizi, A. (2021). The effect of membership in producer organizations on women's empowerment: Evidence from Kenya. *Women's Studies International Forum*. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2021.102492>
- Ntakyo, P., & Van Den Berg, M. (2022). The Unintended Side-Effects of a Major Development Strategy: Commercialization of Smallholder Production and Women Empowerment in Uganda. *The Journal of Development Studies*, 58, 1605–1626. <https://doi.org/10.1080/00220388.2022.2032671>
- Pattanaik, I., & Lahiri-Dutt, K. (2020). What determines women's agricultural participation? A comparative study of landholding households in rural India. *Journal of Rural Studies*, 76, 25–39. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.03.008>
- Pattanaik, I., & Lahiri-Dutt, K. (2021). Do women like to farm? Evidence of growing burdens of farming on women in rural India. *The Journal of Peasant Studies*, 49, 629–651. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1867540>
- Picchioni, F., Zanello, G., Srinivasan, C., Wyatt, A., & Webb, P. (2020). Gender, time-use, and energy expenditures in rural communities in India and Nepal. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105137>
- Pierotti, R., Friedson-Ridenour, S., & Olayiwola, O. (2022). Women farm what they can manage: How time constraints affect the quantity and quality of labor for married women's agricultural production in southwestern Nigeria. *World Development*, 152. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105800>
- Quisumbing, A., Cole, S., Elias, M., Faas, S., Galizi, A., Malapit, H., ... Twyman, J. (2023). Measuring

- Women's Empowerment in Agriculture: Innovations and evidence. *Global Food Security*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100707>
- Quisumbing, Agnes, Heckert, J., Faas, S., Ramani, G., Raghunathan, K., Malapit, H., ... Seymour, G. (2021). Women's empowerment and gender equality in agricultural value chains: evidence from four countries in Asia and Africa. *Food Security*, 13, 1101–1124. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01193-5>
- Rao, N., & Raju, S. (2020). Gendered Time, Seasonality, and Nutrition: Insights from Two Indian Districts. *Feminist Economics*, 26, 125–195. <https://doi.org/10.1080/13545701.2019.1632470>
- Rao, S., Ramnarain, S., Naidu, S., Uppal, A., & Mukherjee, A. (2023). Work and social reproduction in rural India: Lessons from time-use data. *Journal of Agrarian Change*. <https://doi.org/10.1111/joac.12569>
- Reich-Stiebert, N., Froehlich, L., & Voltmer, J. (2023). Gendered Mental Labor: A Systematic Literature Review on the Cognitive Dimension of Unpaid Work Within the Household and Childcare. *Sex Roles*, 88, 475–494. <https://doi.org/10.1007/s11199-023-01362-0>
- Rowland, D., Zanello, G., Waliyo, E., & Ickowitz, A. (2022). Oil palm and gendered time use: A mixed-methods case study from West Kalimantan, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102682>
- Sey-Sawo, J., Sarr, F., Bah, H., & Senghore, T. (2023). Women's empowerment and nutritional status of children in the Gambia: further analysis of the 2020 Gambia demographic and health survey. *BMC Public Health*, 23. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15494-1>
- Shibata, R., Cardey, S., & Dorward, P. (2020). Gendered Intra-Household Decision-Making Dynamics in Agricultural Innovation Processes: Assets, Norms and Bargaining Power. *Journal of International Development*. <https://doi.org/10.1002/jid.3497>
- Singh, P., & Pattanaik, F. (2020). Unfolding unpaid domestic work in India: women's constraints, choices, and career. *Palgrave Communications*, 6, 1–13. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0488-2>
- Thorpe, J. (2018). Procedural Justice in Value Chains Through Public–Private Partnerships. *World Development*, 103, 162–175. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.004>
- Timmermann, C., & Ffällix, G. (2015). Agroecology as a vehicle for contributive justice. *Agriculture and Human Values*, 32, 523–538. <https://doi.org/10.1007/s10460-014-9581-8>
- Tripathi, S., Azhar, S., & Zhai, F. (2022). Unpaid care work among women in South Asia: A systematic review. *Asian Social Work and Policy Review*. <https://doi.org/10.1111/aswp.12268>
- Valencia, V., Wittman, H., Jones, A., & Blesh, J. (2021). Public Policies for Agricultural Diversification: Implications for Gender Equity. 5. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.718449>
- Van Zonneveld, M., Turmel, M., & Hellin, J. (2020). Decision-Making to Diversify Farm Systems for Climate Change Adaptation. 4. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00032>